TAJUK RENCANA

'Gogrok Covid' dan Makna Kebersamaan

APA itu Gogrok Covid? Makna gogrok itu jatuh biasanya diartikan buah yang jatuh dari pohon, tetapi bisa juga diartikan rontok. Jadi kalau digabung dengan Covid, berarti menjatuhkan menghancurkan virus yang masih merajelala di dunia. Rasanya pas kalau kemudian program tersebut, yang dilakukan Kalurahan Purbayan Kota Yogya masuk dalam Top 21 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (KR 1/12).

Gogrok Covid-19 merupakan inovasi program penanganan Covid-19, akronim dari Gotong Royong Ketahanan Masyarakat Menghadapi Wabah Covid-19. Dalam program tersebut, gotong royong antarwarga dijadikan sebagai ujung tombak menghadapi situasi pandemi Korona ini.

Apa saja aktivitasnya? Kegiatan gotong royong itu mulai dari berbagi sembako, menyiapkan lumbung pangan, menyediakan dapur umum, menginisiasi *urban farming* dan budidaya lele untuk ketahanan pangan. Hingga peningkatan sarana belajar sekolah daring. Hebatnya program ini mampu terlaksana sepenuhnya karena swadaya masyarakat, ini kata Lurah Purbayan, Ari Suryanim .

Dari Jawa Tengah, penghargaan Top 21 diperuntukkan program Jogo Tonggo. Aksi ini merupakan inovasi pemberantasan Covid-19, berbasis kewilayahan. Melalui Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2020, dibentuk Satgas Jogo Tonggo, yang memberdayakan warga hingga wilayah Rukun Warga (RW).

Apa itu 'Jogo Tonggo'? Yakni program mengedepankan partisipasi aktif warga untuk saling menjaga dari penularan Covid-19. Jika ada yang terinfeksi virus Corona, warga dapat saling menjaga dengan memberikan perhatian, dan tidak memberikan stigma pada mereka yang tertular.

Aksi tersebut, disesuaikan dengan kemampuan warga. Misalnya ada warga yang terdampak Covid-19, baik keluarganya tertular, atau terkena mungkin saja karena perusahaannya bangkrut akibat pandemi itu. Di sejumlah kelurahan, hal tersebut juga diberlakukan misalnya membuat posko yang menyediakan bahan makanan untuk warga yang memang memerlukan karena terdampak pagebluk.

Aksi Jogo Tonggo kemudian dikembangkan diaplikasikan dalam bermacam kegiatan serupa. Misalnya Jogo Santri, yang diterapkan pada lingkungan pondok pesantren. Adapula Jogo Plesiran, yang diterapkan di lingkungan pariwisata. Kemudian Pemprov Jateng mengapresiasi dengan pemberian 'jogo tonggo kit'. Yakni paket untuk menanggulangi Covid-19 berisi Alat Pelindung Diri (APD), sepatu boot, sarung tangan, penyemprot disinfektan otomatis, ribuan lembar masker kain, hand sanitizer, disinfektan, thermogun dan modul.

Apa yang kita tangkap dari penilaian kreatif tersebut? Adalah sikap nguri-uri memelihara sikap gotong royong. Sikap semacam ini sebenarnya sudah kita temui dalam semua lapisan masyarakat Indonesia. Yogyakarta sebenarnya juga sudah melakukan. Masyarakat Indonesia yang majemuk dengan beragam adat ternyata hampir semuanya memiliki , meski dalam istilah yang berbeda. Gotong royong punya makna adanya saling membantu, mengatur diri secara berdaulat. Sifat dasar masyarakat kita, nilai moral ikhlas untuk berpartisipasi, kebersamaan dan saling bantu antar sesama. Maka sikap ini mengajarkan nilai kesetaraan, keadilan, dan kebersamaan dalam memecahkan masalah.

Maka penghargaan Top 21 Inovasi Pelayanan Publik tersebut, rasanya sangat pas bila diterapkan untuk semua masyarakat dalam situasi pandemi yang belum diketahui kapan berakhirnya. Sikap yang sesuai dengan salah satu butir dalam Pancasila tersebut membuktikan, kalau semua berdaulat saling membantu tanpa harus merasa paling menonjol, akan sangat membantu publik menghadapi tantangan. Jadikanlah kaca benggala, untuk terus memelihara makna gotong royong dan mufakat setiap menghadapi masalah. ***

Korpri Jangan Korupsi

Saratri Wilonoyudho

HARI Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) selalu diperingati 29 November. Korpri adalah abdi masyarakat dan pelayanan masyarakat yang ditempatkan di instansi atau lembaga birokrasi negara. Mereka adalah *the civil servant*, pelayan. Karena demikian strategis perannya untuk mensejahterakan rakyat, maka sebelum bertugas, mereka disumpah melalui serangkaian ëupacara sakralí di bawah kitab suci.

Mereka dalam bahasa agama disebut *khalifah* yang ditugasi memanajemen bumi Indonesia ini melalui tugas dan pelayanan masing-masing. Karena sudah berjanji atas nama Tuhan, logikanya mereka tidak akan mencuri atau korupsi. Sebab tindakan korupsi pada dasarnya mengingkari sumpah dan menantang Tuhan.

Korpri dan Birokrasinya mestinya efisien dan efektif dan jangan lagi berbau politis. Jangan sampai diamanahi untuk menyejahterakan rakyat, justru merecoki rakyat, misalnya bukannya membina petani, peternak, petambak, pelaku UMKM dan lainnya. Namun justru yang dilakukan hanyalah ekspor-impor yang menguntungkan secara finansial pribadi atau kelompoknya.

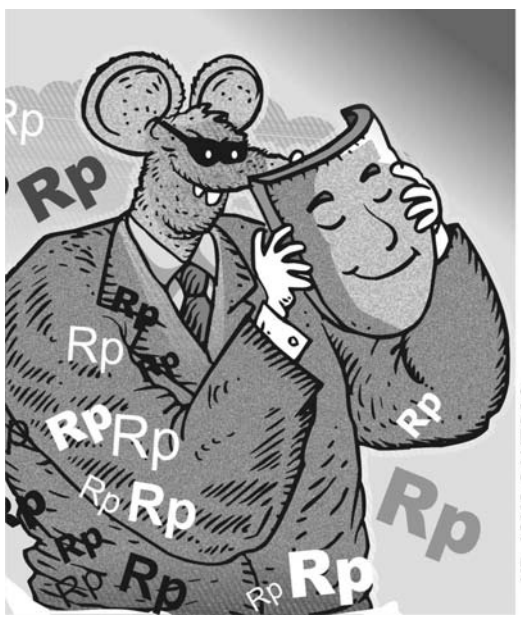

KR-JOKO SANTOSO

Kubangan Politik

Korpri dan Birokrasi jangan terbenam dalam kubangan politik untuk kepentingan pemenangan pilkada misalnya. Sederhana saja, beberapa waktu yang lalu, ada beberapa oknum Kepala Daerah yang nekad merotasi hampir seluruh jajaran camat dan lurah hanya karena mereka tidak mendukung dirinya dalam pilkada yang lalu. Alasannya klasik, *tour of duty*. Namun jika mengamati jumlahnya sebesar itu, rasanya orang sulit percaya alasannya. Hasilnya adalah bagi-bagi kekuasaan, dan ujungnya korupsi.

Jika ada oknum Korpri yang korupsi, maka berarti menentang kekuasaan Tuhan. Lihat saja para koruptor yang selama ini tertangkap, setidaknya menjadi tersangka. Tidak dinyana sebelumnya, karena orang percaya kepada penampilannya, agamanya, jabatannya, serta partai yang dihuninya. Mereka banyak yang berwajah santun, cantik, ganteng, bahkan banyak di antara mereka dikenal tokoh agama, atau tokoh partai yang mengaku bersih dan jujur ketika kampanye.

Kenyataannya, meski alat bukti hampir pasti mengarah kepadanya, toh mereka masih berani berbohong kepada Tuhan. Kenapa berbohong kepada Tuhan? Karena yang mereka bawa bukan miliknya. Padahal jika mereka jujur dan sabar, serta taat kepada (hukum) Tuhan, hidup mereka akan jauh lebih baik, kaya, bahagia dan dimuliakanNya dibandingkan jika mereka mencuri. Bayangkan saja berapa penghasilan seorang menteri, anggota DPR, atau pejabat publik lainnya, jelas dengan cara jujur saja mereka akan kaya raya. Mengapa harus mencuri ?

Para koruptor tersebut sesungguhnya sangat takut terhadap keselamatan keluarganya. Lihat saja ungkapan salah satu tersangka : *Saya akan mengaku dan berkata jujur, asal anak isteri saya tidak diganggu*. Karenanya bisa sumpah pegawai tidak saja ditujukan kepada Tuhan, namun juga kepada keluarganya.

Lebih Ganas

Tentu orang tertawa dengan usul nyeleneh ini. Namun harus diingat ini zaman darurat yang semuanya masih serba tidak dapat dipercaya. Tuhan dalam kitab suci berfirman bahwa kelak di akherat nanti, setiap manusia akan ditanyai apa amal perbuatan yang telah dilakukan di dunia ini. Mengapa orang-orang yang pengetahuan dan praktik beragamanya sudah tinggi namun masih juga korupsi ? Jawabnya sederhana saja, mereka (para koruptor) baru sebatas menjalankan syariat agama.

Benar kata orang Jawa, *Gusti Allah ora sare, sing becik ketitik, sing ala ketara*. Koruptor itu akibatnya bisa lebih ganas dari pada tindakan para teroris. Para teroris menyerang kelompok tertentu, namun kejahatan oknum pejabat yang ber-*kong-kalikong* dengan penjahat, menghancurkan ekonomi bangsa, dan akibatnya bangsa terpuruk. Sebagian dari bangsa ini kelaparan, dianiaya, stres, bunuh diri, dst, karena kesulitan ekonomi akibat dijarah *kong-kalikong* dengan oknum *cukong*. ❑

*)***Prof Dr Saratri Wilonoyudho**, *Anggota Korpri*.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat.* Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email *pikiranpembaca@gmail.com*. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Bugel, Menuju CoE Kampung KB

SUNGGUH beruntung kita memiliki Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Kalurahan Bugel yang berada di wilayah Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulonprogo, DIY. Kampung KB yang saat ini menjadi pilot project Lingkungan Sehat Keluarga Sejahtera (LSKS) kerja sama antara Pemda Kulonprogo, BKKBN dan negara Seychelles, yang kemudian dikenal sebagai CoE Kampung KB. Karena dengan keberadaan CoE Kampung KB di Bugel, kita telah memiliki Kampung KB Percontohan, tidak saja untuk level DIY maupun nasional, tetapi hingga tataran internasional.

Penunjukan Kalurahan Bugel yang memiliki luas wilayah 642,32 hektare dan berpenduduk 4.323 jiwa ini mendasarkan pada *need assessment* yang dilakukan oleh Tim BKKBN dan utusan Seychelles terkait isu lingkungan pada akhir tahun 2019 lalu, dan menemukan banyak permasalahan yang memerlukan penanganan serius. Sampai akhirnya BKKBN berkeputusan menetapkan Kampung KB Bugel sebagai pilot project LSKS.

Soft launching Kampung KB Bugel sebagai CoE Kampung KB telah dilakukan oleh Kepala BKKBN Pusat dr Hasto Wardoyo SpOG (K), pada Jumat, 28 Februari 2020 lalu di Aula Adikarto, Kompleks Kantor Pemerintah Kabupaten Kulonprogo. Sementara *launching* resminya yang ditandai dengan Deklarasi oleh Pokja Kampung KB dilakukan Senin, 30 November 2020 secara virtual di Balai Kalurahan Bugel dan disaksikan oleh Kepala BKKBN Pusat, Duta Besar Seycheless, Gubernur DIY, Bupati Kulonprogo, Ketua DPRD dan tamu undangan lainnya di ruang yang sama pada saat *soft launching*.

Dalam rangka mewujudkan Kampung Keluarga Berkualitas yang dapat diandalkan, Pemerintah Kalurahan Bugel yang didukung oleh lintas sektor dan pendampingan dari BKKBN serta Tim Ahli Sosiologi UGM, melakukan berbagai upaya penguatan baik dari aspek kelembagaan, tata kelola maupun kegiatannya. Dari aspek kelembagaan, selain menyempurnakan struktur dan tata kelola, juga melakukan penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) berbasis data. Di samping itu juga membenahi kelembagaan Bank Sampah, Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga serta Penguatan Forum Genre sebagai pendamping Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R).

Dari aspek tata kelola, selain membentuk rute saluran aspirasi masyarakat yang dibakukan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), juga melakukan integrasi kegiatan Kampung KB ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran kalurahan. Dari aspek kegiatan, telah dilakukan Sosialisasi KB dan kesehatan reproduksi, juga telah dilakukan pembinaan terhadap kelompok kegiatan yang ada di Kampung KB antara lain PIK Remaja melalui Orientasi Pendidik Sebaya/Konselor Sebaya, Sosialisasi PUP dan lain-lain, Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) melalui Sosialisasi Ketahanan Keluarga, PRO PN dan 1000 HPK, Kelompok UPPKS melalui pelatihan pengolahan cabe dan sabut kelapa serta pemasarannya yang berbasis IT dan Kelompok Bank Sampah melalui pelatihan pengolahan sampah organik dan anorganik .

Dengan terlaksananya beragam kegiatan tersebut, sekarang ini Kampung KB Bugel telah makin berkembang. Karena selain telah memiliki tata kelola dan kelembagaan Kampung KB yang mantab juga terintegrasi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran kalurahan yang memadai.

Ke depan, Kampung KB Bugel tentu akan terus bergerak maju menjadi Kampung KB yang Mandiri dan Berkelanjutan, di mana program-programnya dapat dijalankan secara optimal dengan melibatkan segenap komponen masyarakat dan lintas sektor, sehingga manfaatnya semakin dapat dirasakan oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat masyarakat Kalurahan Bugel.

Drs Mardiya
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulonprogo.

Pandemi dan Nalar Dikotomis

Thoriq Tri Prabowo

SINERGI adalah kunci. Begitulah jargon yang kerap diutarakan untuk menyelesaikan segala jenis persoalan di republik ini. Memang terdengar klise, namun sepertinya sinergi itulah yang diperlukan di tengah kompleksnya persoalan masyarakat majemuk. Dalam konteks untuk menekan angka positif pandemi Covid-19 ini yang per 29 November sebesar 534.266 dan angka meninggal 18.816 (KR, 30/11), sinergi dari berbagai pihak juga mutlak diupayakan.

Tenaga kesehatan yang sering dianggap sebagai garda terdepan dalam menghentikan laju Covid-19, justru sebenarnya ialah pertahanan terakhir. Pasalnya, publik sebenarnya mampu mengambil peran preventif dengan melakukan serangkaian kegiatan protokol kesehatan. Dengan mengambil peran tersebut, publik yang terdiri dari berbagai elemen lah yang justru menjadi garda terdepan untuk mencegah persebaran Covid-19.

Terkotak-kotak

Memang tidak mudah untuk bangkit dan beradaptasi dengan tragedi yang berdampak luas pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia ini. Pemerintah pun kemudian menerbitkan pelbagai kebijakan terkait pandemi, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, politik, dan lainnya. Sebagaimana kebijakan yang lain, kebijakan taktis dalam merespons pandemi tersebut juga menuai pro dan kontra.

Pro kontra terhadap kebijakan memang wajar apabila didasarkan pada kesadaran konstruktif. Namun pada praktiknya narasi tersebut kerap muncul lantaran asumsi yang tidak proporsional. Dampaknya, tujuan-tujuan yang ditargetkan kebijakan tersebut menjadi tidak maksimal atau bahkan kontraproduktif. Pandemi yang menjadi tragedi bersama, ironisnya masih sering ditarik ke dalam diskursus politik praktis dan politik identitas. Sehingga seakan muncul kubu-kubu politik dalam menyikapi pandemi.

Terkotak-kotaknya sikap tersebut menjadikan polarisasi di tengah-tengah publik dalam memandang dan menyikapi pandemi terasa begitu kental. Sebagai contoh, pihak yang pro vaksinasi dikatakan pendukung pemerintah dan yang kontra adalah oposisi. Di media sosial kian kentara, masing-masing orang mengasosiasikan dirinya dengan salah satu kubu.

Padahal, persoalannya tidak sesederhana itu, banyak aspek yang perlu dicermati dengan kehati-hatian. Nalar dikotomis selalu memandang persoalan dengan perspektif hitam-putih seperti yang dicontohkan di atas apabila terus dinarasikan akan semakin membahayakan bangsa ini. Alih-alih segera terbebas dari pandemi, justru nalar tersebutlah yang akan melanggengkan penderitaan publik, akibat kacaunya informasi.

Tebang Pilih

Hal yang kerap menjadi perdebatan publik akibat nalar dikotomis ini ialah terkait larangan berkerumun di masa pandemi. Yang diperdebatkan berkisar pada asumsi bahwa aturan tersebut dilaksanakan secara tebang pilih, hal ini tentu merujuk pada kubu-kubu yang sudah disebutkan di atas. Dengan dalih menuntut keadilan, masing-masing kubu berdebat mempertahankan argumennya. Sikap kritis terkait pentingnya menjaga jarak karena alasan keamanan dan kesehatan justru tidak terdengar sama sekali.

Melihat pandemi ini dengan perspektif dikotomis ini tidak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Pasalnya, nalar tersebut tidak akan mampu melihat fakta secara komprehensif. Implikasinya, dalam menilai kebijakan seseorang tersebut akan mendasarkan penilaiannya bukan pada kemaslahatan, melainkan berdasar *like and dislike*.

Persoalan akibat pandemi tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan. Penyelesaiannya, tidak cukup dengan satu jenis pendekatan. Nalar dikotomis yang menganggap bahwa persoalan pandemi ini sesederhana hitam putih sebagai representasi dari kesalahan dan kebenaran tidak akan pernah membantu ke luar dari pandemi. Sinergi dari berbagai pendekatan adalah kunci utamanya.

Masing-masing pihak memiliki peranan pentingnya, sehingga tidak ada yang lebih unggul dari yang lainnya. Pemerintah, tenaga medis, ilmuwan, tokoh elite, ulama, dan seluruh masyarakat umum berkewajiban memiliki visi yang sama. Visi untuk segera keluar dari pandemi. ❑

*)**Thoriq Tri Prabowo MIP**, *Dosen Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

Pojok KR

Gubernur DIY minta AMSI untuk 'Amemayu Ajining Pawarta'.

-- Informasi punya kekuatan dahsyat, jadi jaga dari 'hoaks'.

***

'Gogrok Covid' dapat penghargaan inovasi pelayanan publik.

--Selamat untuk Kalurahan Purbayan Kota Yogya, bisa menjadi contoh.

***

Satgas Kota Yogya waspadai lonjakan kasus Covid-19.

--Khususnya libur panjang Nataru akhir bulan ini.

Berabé

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. **ISSN:** 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwandono,. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.
Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprapto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.